



Mata kuliah:

REFORMASI SISTEM KESEHATAN

PROGRAM STUDI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Kode MK	: KUI 6471
Semester	: 3
Koordinator	: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Tahun Akademik	: 2024-2025

Laksono Trisnantoro

Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Tantangan 1.

Reformasi Kesehatan dalam suasana Fragmentasi kebijakan kesehatan pasca adanya UU SJSN dan UU BPJS

Daftar Isi

Pengantar

**Bagian 1 Sistem Kesehatan dan
Komponen Pembiayaan**

**Bagian 2 *Supply Side* dalam Sistem
Kesehatan**

**Bagian 3 Monitoring JKN: Adanya
Fragmentasi**

Bagian 4 Tantangan-Tantangan JKN

**Bagian 5 Melihat Kebijakan Masa Lalu
dan Mendatang**

**Penutup: Bagaimana menutup
Fragmentasi Sistem Kesehatan**

Menyimak buku saya



Menekankan mengenai Sistem Kesehatan yang menggunakan teori sistem

Ada komponen-komponen fungsional yang saling berinteraksi

Buku ini membahas perubahan kebijakan dalam komponen pembiayaan

- Tujuan perubahan kebijakan bagus
- Ada efek samping berupa fragmentasi sistem kesehatan



Bagian 1 Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan

Bab I. Sistem Kesehatan

Bab II. Pembiayaan
Kesehatan

Bab III. Situasi Pembiayaan
Kesehatan di Indonesia

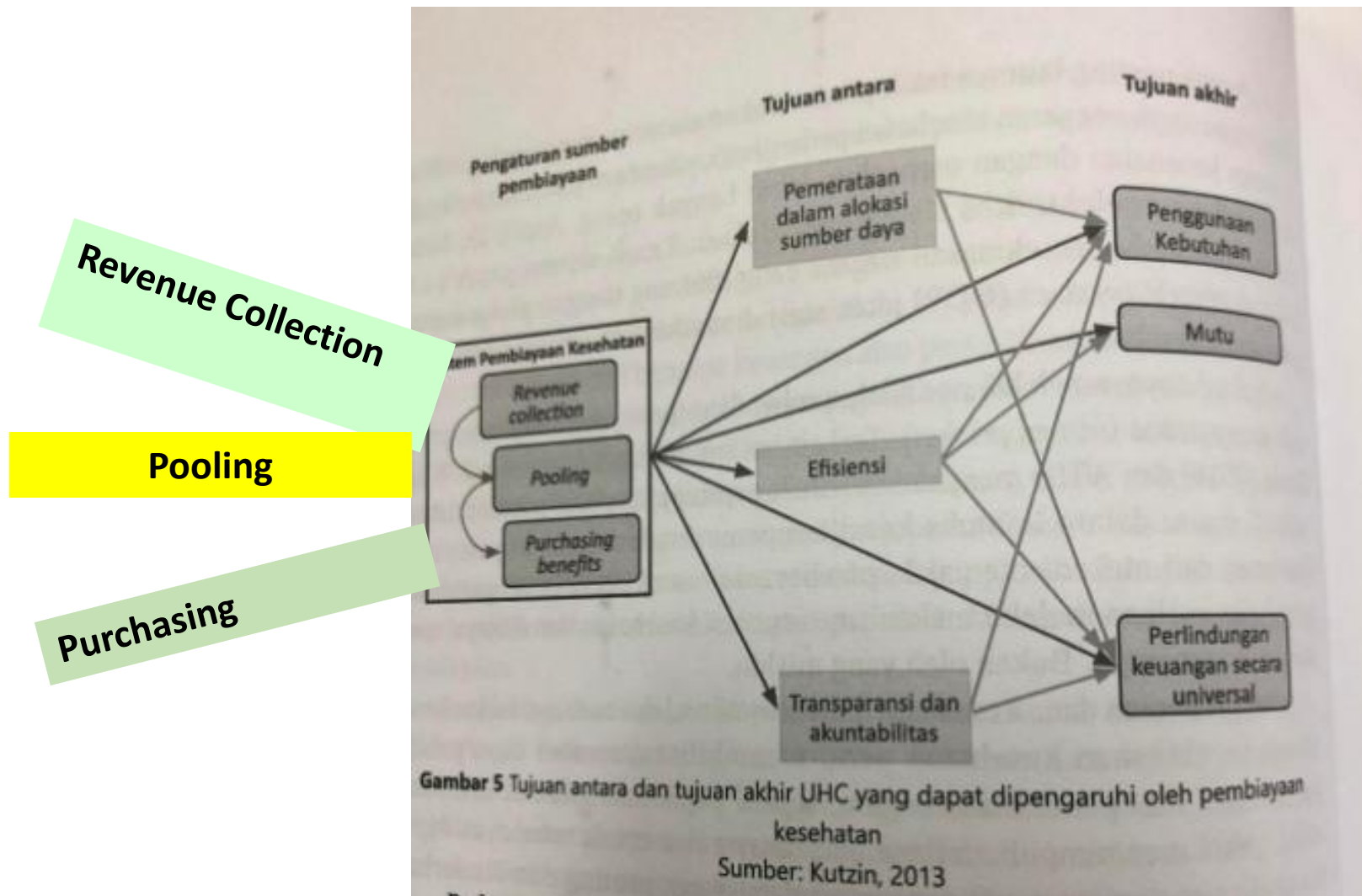
Bab I: Sistem Kesehatan



Pembahasan:

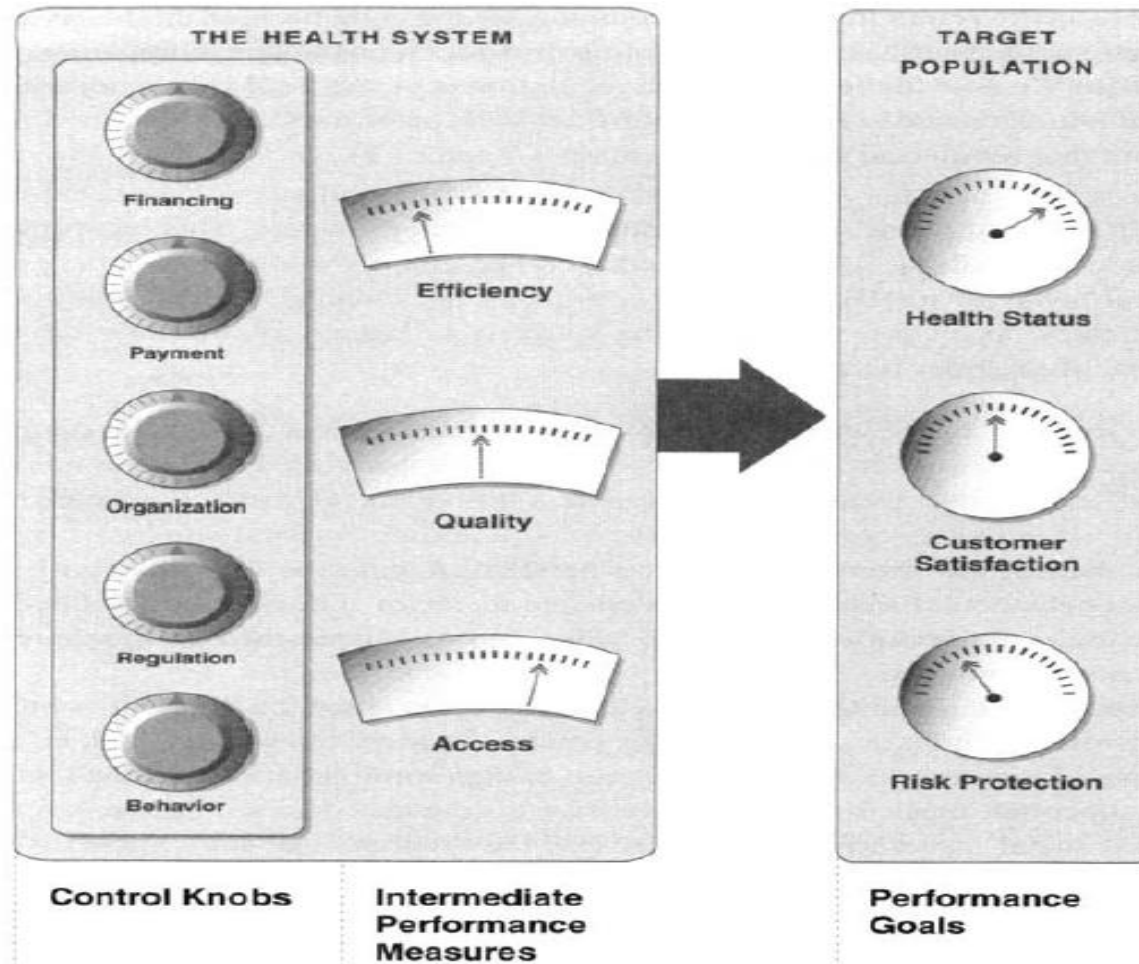
- Ideologi dalam sistem kesehatan: Apakah Indonesia mampu untuk menjadi welfare state?
- Apakah kemampuan pajak kita cukup kuat?
- Perubahan yang terjadi: Biasa dipicu oleh komponen pembiayaan

Bab II. Pembiayaan Kesehatan



Bab III. Reformasi Kesehatan

- Tidak hanya satu kebijakan yang diubah
- Tapi banyak kebijakan



Aspek politik dalam Reformasi





Bagian 2 *Supply Side* dalam Sistem Kesehatan

Bab IV. Fasilitas Kesehatan

Bab V. SDM

Bab IV. Fasilitas Kesehatan

- Indonesia negara kepulauan
- Situasi sudah sangat tidak merata sebelum kebijakan JKN dilakukan
- Pemerintah sudah lama kesulitan menambah jumlah rumahsakit
- Pembayaran ke RS melalui INA-CBG beresiko tidak adil: Daerah yang lengkap yang dapat klaim banyak.

Bab V. Sumber daya Manusia

- Tidak merata sebelum JKN
- Berbagai usaha untuk pengembangan SDM Kesehatan melalui UU Pendidikan Kedokteran: Residen dan DLP...tidak berjalan efektif.
- Pembayaran ke dokter belum dirasa tepat



Bagian 3 Monitoring JKN

Bab VI. Dampak terhadap Jumlah SDM Dokter dan Fasilitas

Bab VII. Dampak terhadap Kelembagaan BPJS dan Pembiayaan

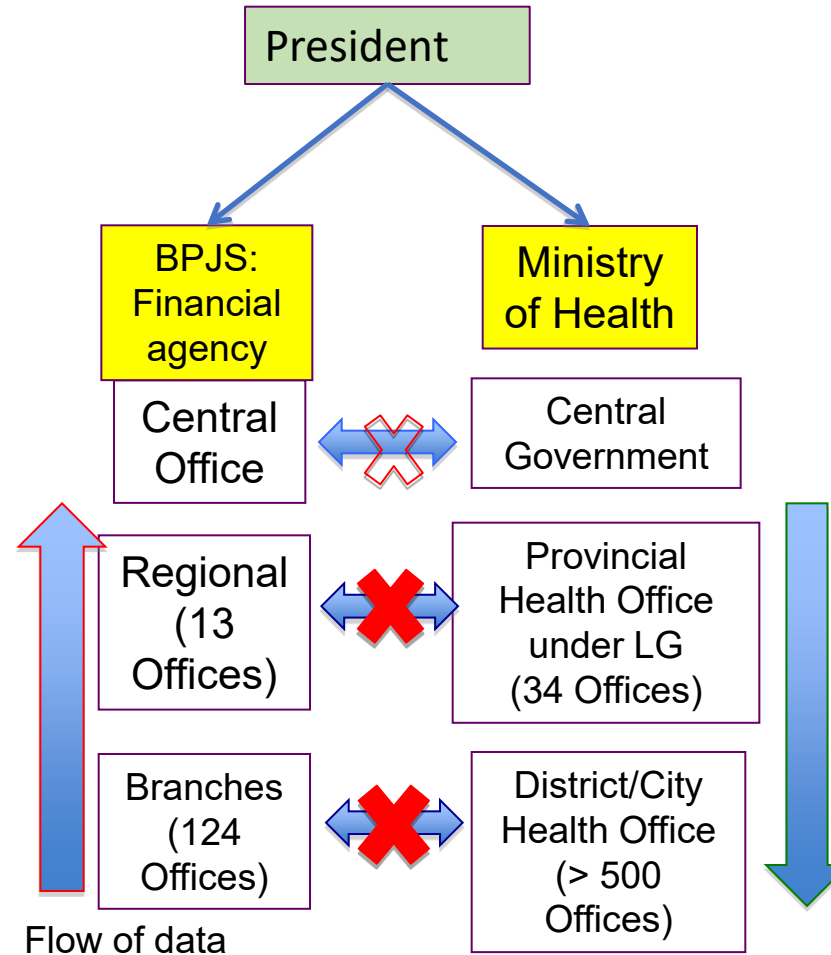
Bab VI. Dampak terhadap Jumlah SDM Dokter dan Fasilitas

- Kebijakan JKN tidak banyak merubah penyebaran
- DI beberapa indikator seperti jumlah RS: kesenjangan antara daerah maju dan belum maju memburuk.
- Kebijakan JKN meningkatkan investasi swasta RS di Jawa dan kota-kota besar

Bab VII. Dampak terhadap Kelembagaan BPJS dan Pembiayaan

- BPJS mewarisi PT Askes Indonesia yang sentralistik
- Pemerintahan dan sektor kesehatan terdesentralisasi
- Terjadi konflik-konflik yang berat
- Terjadi proses fragmentasi dalam sistem kesehatan yang memburuk dari tahun ke tahun

Terjadi fragmentasi





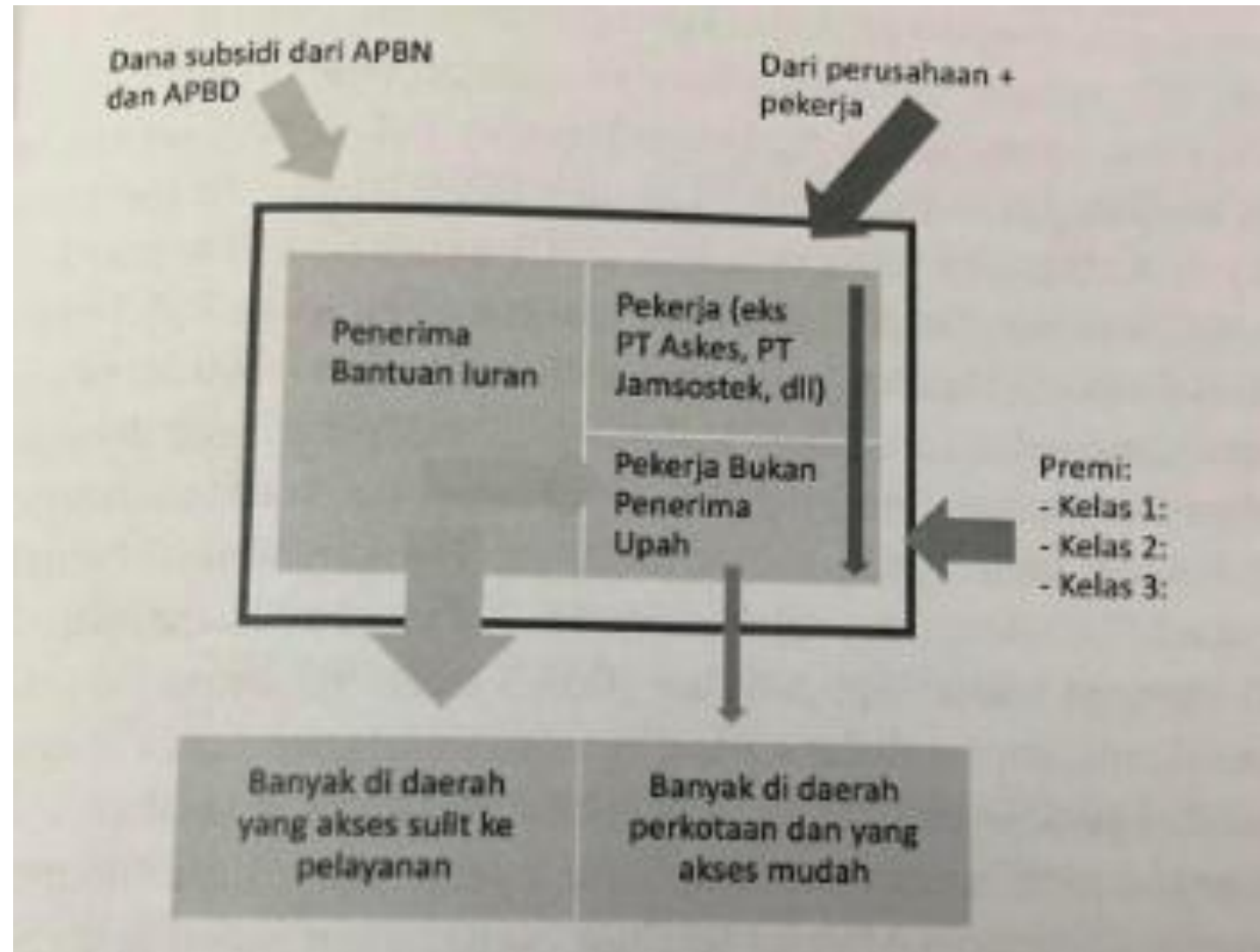
Bagian 4 Tantangan-Tantangan JKN

- Bab VIII. Pemerataan
- Bab IX. *Governance* dalam Sistem Kesehatan

Bab VIII. Pemerataan

- Tujuan UU SJSN dan UU BPJS tentang pemerataan pelayanan kesehatan belum dapat dipenuhi
- Kebijakan kompensasi belum berjalan
- Dana PBI yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu dipergunakan sebagian untuk anggota BPJS yang relatif lebih mampu

Bahaya Single Pool



Bab IX. *Governance* dalam Sistem Kesehatan

- Proses pembuatan keputusan yang buruk;
- Terjadi konflik antar “pembuat kebijakan”;
- Siapa yang menjadi regulator dan operator menjadi kabur;
- Potensi fraud belum dapat dicegah dan ditindak dengan baik.

Laksono Trisnantoro

Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Bagian 5 Melihat Kebijakan Masa Lalu dan Mendatang

- Bab X. Masa Lalu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
- Bab XI. Masa Depan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

Bab X. Masa Lalu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

- Kebijakan jaminan kesehatan lebih diwarnai dengan pengaruh politis;
- UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) disusun dalam situasi yang tidak ideal
- Muatan teknis mengenai asuransi; kesehatan dan pelayanan kesehatan sangat sedikit di dalam kedua UU.

Bab XI. Masa Depan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

Bab yang menanyakan mengenai:

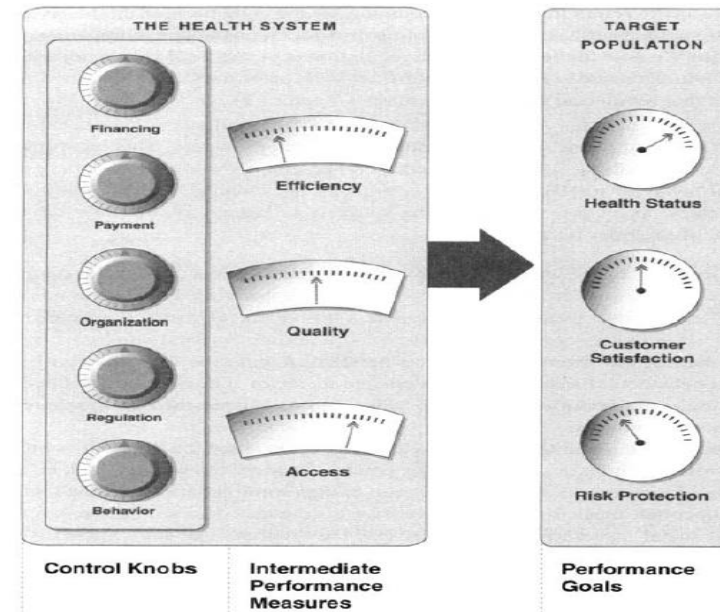
- Apakah kebijakan JKN akan dibiarkan seperti ini?
- Ataukah perlu direvisi?

Ada berbagai usulan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

Penutup:

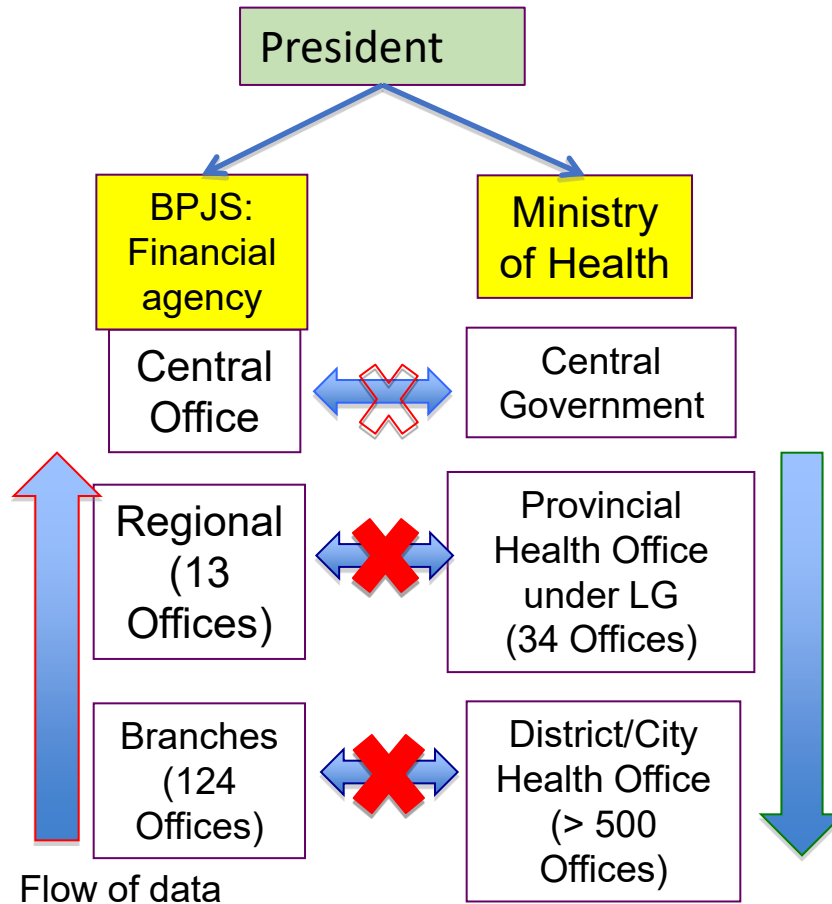
Bagaimana menutup Fragmentasi Sistem Kesehatan

Bagaimana strateginya? Apakah akan menggunakan pendekatan reformasi atau tidak?



Tantangan:

- **Bagaimana mengatasi fragmentasi ini?**
- Apakah UU Kesehatan 2023 mampu menutup fragmentasi ini?



❑Ataukah

❑Perlu revisi UU SJSN
(2004) dan UU BPJS
(2011)?